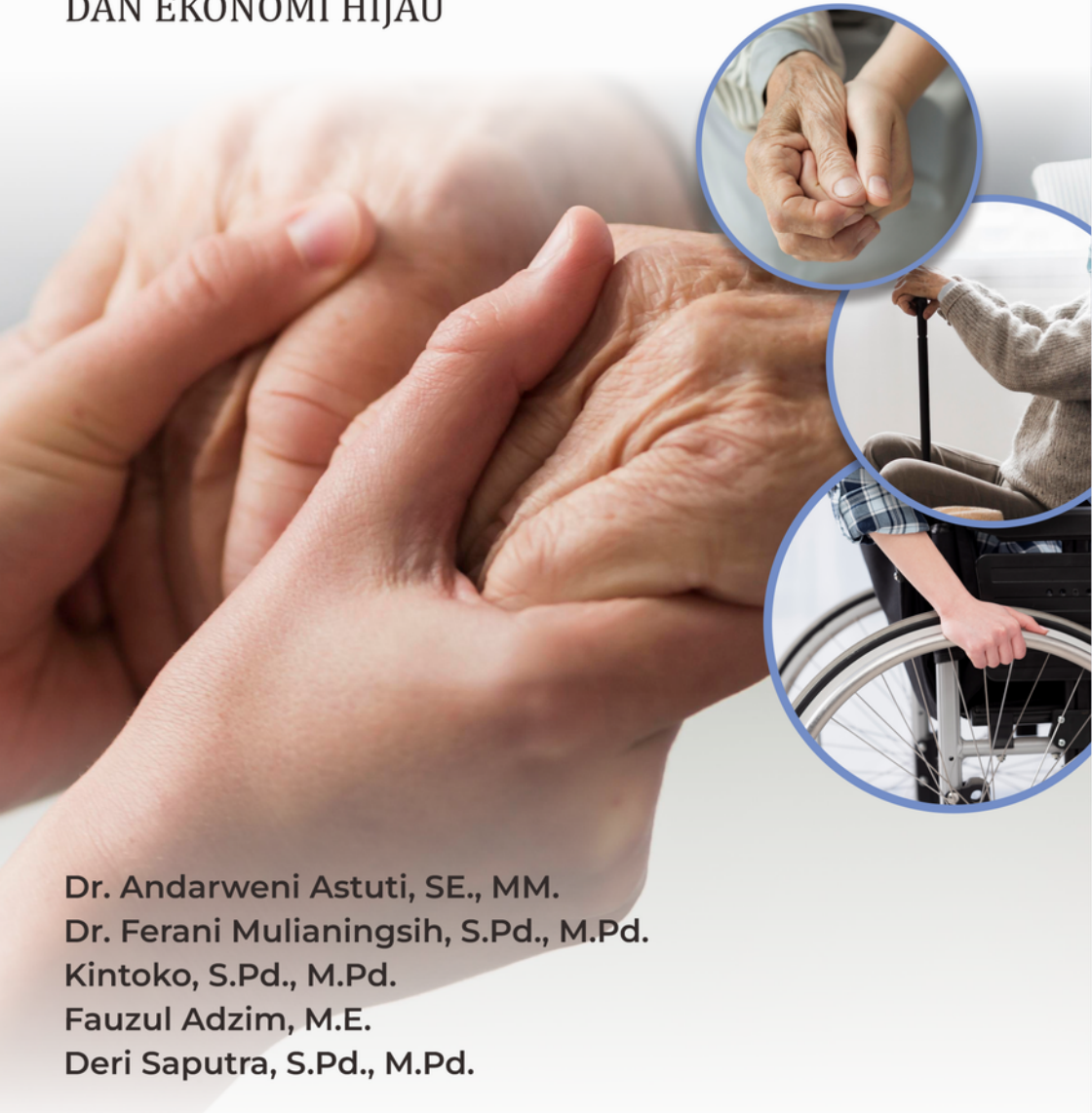


MENGUATKAN KOMUNITAS RENTAN

SINERGI MODERASI BERAGAMA, MITIGASI BENCANA,
DAN EKONOMI HIJAU



Dr. Andarweni Astuti, SE., MM.

Dr. Ferani Mulianingsih, S.Pd., M.Pd.

Kintoko, S.Pd., M.Pd.

Fauzul Adzim, M.E.

Deri Saputra, S.Pd., M.Pd.

MENGUATKAN KOMUNITAS RENTAN: SINERGI MODERASI BERAGAMA, MITIGASI BENCANA, DAN EKONOMI HIJAU

Dr. Andarweni Astuti, SE., MM.
Dr. Ferani Mulianingsih, S.Pd., M.Pd.
Kintoko, S.Pd., M.Pd.
Fauzul Adzim, M.E.
Deri Saputra, S.Pd., M.Pd.



MENGUATKAN KOMUNITAS RENTAN: SINERGI MODERASI BERAGAMA, MITIGASI BENCANA, DAN EKONOMI HIJAU

Penulis:

Dr. Andarweni Astuti, SE., MM.
Dr. Ferani Mulianingsih, S.Pd., M.Pd.
Kintoko, S.Pd., M.Pd.
Fauzul Adzim, M.E.
Deri Saputra, S.Pd., M.Pd.

Editor:

Syifa Ismayanti

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Februari 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Menguatkan Komunitas Rentan: Sinergi Moderasi Beragama, Mitigasi Bencana, Dan Ekonomi Hijau sesuai yang ditargetkan.

Buku ini berisikan kosep dasar komunitas rentan, prinsip moderasi beragama, konsep mitigasi bencana, konsep ekonomi hijau. Selain itu buku ini membahas moderasi beragama dalam masyarakat; mitigasi bencana dan resiliensi komunitas; ekonomi hijau dan pemberdayaan komunitas; sinergi antara moderasi beragama, mitigasi bencana, dan ekonomi hijau.

Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Februari 2025, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEP DASAR	1
A. Definisi Komunitas Rentan	1
B. Prinsip Moderasi Beragama	13
C. Konsep Mitigasi Bencana	22
D. Konsep Ekonomi Hijau	30
 BAB 2 MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT	 45
A. Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Toleransi	45
B. Modal Sosial dan Budaya Lokal dalam Moderasi Beragama	52
 BAB 3 MITIGASI BENCANA DAN RESILIENSI KOMUNITAS	 73
A. Strategi Mitigasi Bencana untuk Komunitas Rentan	73
B. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	84
 BAB 4 EKONOMI HIJAU DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS	 95
A. Konsep Ekonomi Hijau dan Implikasinya bagi Komunitas Rentan	95
B. Inisiatif Ekonomi Hijau: Peluang dan Tantangan	104

BAB 5 SINERGI ANTARA MODERASI BERAGAMA, MITIGASI BENCANA, DAN EKONOMI HIJAU	107
A. Hubungan Antara Tiga Elemen Kunci	107
B. Model Sinergi untuk Penguatan Komunitas Rentan	109
C. Rekomendasi Kebijakan untuk Sinergi yang Efektif	114
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB 1

KONSEP DASAR

A. Definisi Komunitas Rentan

Komunitas rentan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, disabilitas, usia lanjut, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta marginalisasi sosial dan budaya. Dalam konteks sosial, komunitas rentan sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Komunitas rentan merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, keterpinggiran sosial, serta paparan terhadap bencana alam atau konflik. Menurut berbagai literatur, komunitas rentan sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi khusus dari pemerintah dan organisasi sosial.

1. Karakteristik Komunitas Rentan

Komunitas rentan memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya, di antaranya:

- a. **Keterbatasan Ekonomi:** Banyak anggota komunitas rentan hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas terhadap pekerjaan layak dan sumber daya

ekonomi.

- b. Akses Terbatas terhadap Layanan Dasar: Kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya menjadi ciri khas komunitas rentan.
- c. Ketidakberdayaan Sosial: Mereka sering mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan kurang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di lingkungan mereka.
- d. Paparan terhadap Risiko Lingkungan: Komunitas rentan sering kali berada di daerah yang rawan bencana, seperti banjir, gempa bumi, atau pencemaran lingkungan.
- e. Ketergantungan terhadap Bantuan Eksternal: Karena kurangnya kapasitas internal, komunitas ini sering mengandalkan bantuan dari pemerintah, LSM, atau organisasi internasional.

2. Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Politik terhadap Kerentanan

Kerentanan suatu komunitas dapat dipahami dari berbagai perspektif:

a. Perspektif Sosial

- Dalam perspektif sosial, komunitas rentan sering dikaitkan dengan kesenjangan sosial yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik (Clay & Greer, 2019). Faktor-faktor seperti gender, etnisitas, dan status sosial dapat memperparah kondisi kerentanan.
- Jaringan sosial yang lemah juga berkontribusi terhadap keterbatasan dalam memperoleh dukungan dan informasi yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan hidup.

b. Perspektif Ekonomi

- Dari sudut pandang ekonomi, komunitas rentan cenderung memiliki sumber daya finansial yang terbatas, pekerjaan informal dengan pendapatan rendah, serta kurangnya akses terhadap kredit dan modal usaha (Maslakci et al., 2024).
- Kemiskinan struktural menjadi salah satu penyebab utama yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran ketidakberdayaan.

c. Perspektif Politik

- Secara politik, komunitas rentan sering kali tidak memiliki suara yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan. Mereka kurang mendapatkan representasi yang memadai dalam struktur pemerintahan dan sering kali tidak memiliki akses terhadap hak-hak sipil yang setara.
- Kebijakan publik yang tidak inklusif dapat memperburuk kondisi komunitas rentan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan distribusi sumber daya.

3. Faktor Penyebab Kerentanan

Kerentanan dalam berbagai aspek kehidupan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanan suatu individu, kelompok, atau masyarakat:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan besar dalam menentukan tingkat kerentanan suatu masyarakat. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat meningkatkan kerentanan.

Masyarakat dengan daya beli rendah sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap berbagai risiko sosial dan bencana.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Struktur sosial dan budaya dalam masyarakat juga memengaruhi tingkat kerentanan. Faktor seperti tingkat pendidikan, kesetaraan gender, norma budaya, dan solidaritas sosial dapat menentukan bagaimana suatu komunitas menghadapi tantangan. Masyarakat dengan struktur sosial yang lemah atau dengan ketidaksetaraan sosial yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap berbagai risiko, termasuk bencana alam dan konflik sosial.

c. Faktor Lingkungan dan Bencana Alam

Lingkungan yang tidak stabil dan rawan bencana alam meningkatkan kerentanan masyarakat. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, dan polusi dapat memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan (Shintaro Okazaki, Amadeo Benavent-Climent, Angeles Navarro, 2015; Tweneboah-Koduah et al., 2022; Yap et al., 2023). Selain itu, lokasi geografis suatu wilayah juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanan terhadap bencana alam.

d. Faktor Kesehatan dan Kesejahteraan

Akses terhadap layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi faktor penentu kerentanan. Masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular lebih rentan terhadap berbagai ancaman. Selain itu, malnutrisi dan

kurangnya akses terhadap air bersih dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat yang sudah rentan.

e. Faktor Politik dan Kebijakan Publik

Stabilitas politik dan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah sangat memengaruhi tingkat kerentanan masyarakat. Kebijakan yang tidak inklusif, kurangnya perlindungan sosial, serta lemahnya tata kelola pemerintahan dapat memperburuk kerentanan sosial dan ekonomi. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan korupsi dapat semakin memperburuk kondisi kelompok masyarakat yang sudah rentan.

Setiap faktor di atas saling berkaitan dan dapat memperburuk atau mengurangi tingkat kerentanan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari faktor-faktor tersebut serta meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Jenis-Jenis Komunitas Rentan

a. Komunitas Miskin dan Terpinggirkan

Komunitas miskin dan terpinggirkan adalah kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya. Faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan marginalisasi sosial membuat kelompok ini lebih rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Mereka sering kali tinggal di daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga lebih sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

b. Komunitas Penyandang Disabilitas

Komunitas penyandang disabilitas mencakup individu dengan berbagai keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka sering menghadapi diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas terhadap fasilitas umum, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dukungan kebijakan inklusif, aksesibilitas yang lebih baik, dan program pemberdayaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

c. Komunitas Lansia

Komunitas lansia merupakan kelompok yang rentan karena faktor usia yang semakin tua sering kali disertai dengan penurunan kesehatan, keterbatasan mobilitas, serta ketergantungan ekonomi dan sosial. Banyak lansia yang hidup sendiri atau bergantung pada keluarga, sehingga mereka berisiko mengalami kesepian, keterlantaran, atau eksploitasi. Program perawatan kesehatan yang memadai, dukungan sosial, dan lingkungan yang ramah lansia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

d. Perempuan dan Anak-Anak

Perempuan dan anak-anak sering dianggap sebagai kelompok rentan karena mereka lebih berisiko mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Perempuan dapat menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, sementara anak-anak rentan terhadap permasalahan seperti kekurangan gizi, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan manusia. Perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan, dan program pemberdayaan perempuan dan anak sangat penting untuk mengurangi kerentanan mereka.

e. Komunitas Minoritas dan Migran

Komunitas minoritas dan migran sering mengalami diskriminasi sosial, budaya, dan ekonomi. Mereka dapat menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, komunitas ini sering menghadapi stigma dan prasangka yang dapat memperburuk kondisi sosial mereka. Kebijakan inklusif, perlindungan hukum, serta program integrasi sosial sangat penting untuk mendukung hak-hak mereka.

f. Komunitas yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana

Komunitas yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti daerah yang sering mengalami banjir, gempa bumi, atau tanah longsor, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap infrastruktur yang tahan bencana dan sumber daya yang cukup untuk memitigasi dampak bencana (Barua et al., 2017; Clay & Greer, 2019). Program mitigasi bencana, pendidikan tanggap darurat, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh komunitas ini.

5. Dampak Kerentanan terhadap Kehidupan Sosial

Kerentanan dalam kehidupan sosial merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami risiko tinggi terhadap berbagai tekanan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, bencana alam, konflik sosial, atau ketidakadilan struktural. Dampaknya terhadap kehidupan sosial sangat beragam, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut uraian mengenai Dampak Kerentanan terhadap Kehidupan Sosial:

a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Kerentanan sosial sering kali memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Individu atau kelompok yang mengalami kerentanan, seperti masyarakat miskin, korban bencana, atau kelompok minoritas, cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan, meningkatnya angka pengangguran, serta rendahnya daya beli. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat memicu konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Sinulingga et al., 2020).

b. Kesenjangan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Kerentanan sosial berdampak langsung pada terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sering kali kesulitan mengakses fasilitas pendidikan yang layak, baik karena biaya sekolah yang tinggi, minimnya fasilitas di daerah terpencil, maupun kurangnya tenaga pendidik berkualitas. Demikian pula dalam bidang kesehatan, kelompok rentan sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyakit, memiliki harapan hidup yang lebih rendah, serta sulit meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

c. Dampak Psikologis dan Kesehatan Mental

Kerentanan sosial juga berdampak pada kesehatan mental individu atau kelompok yang mengalaminya. Stres akibat ketidakpastian ekonomi, tekanan sosial, kehilangan tempat tinggal akibat bencana, atau diskriminasi dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti kecemasan,

depresi, dan trauma. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas individu, hubungan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya dukungan psikososial bagi kelompok rentan semakin memperburuk kondisi ini, menyebabkan mereka sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

d. Eksklusi Sosial dan Diskriminasi

Salah satu dampak paling serius dari kerentanan sosial adalah eksklusi sosial, yaitu kondisi di mana individu atau kelompok tertentu tidak memiliki akses atau kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksklusi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, atau status ekonomi. Hal ini dapat menghambat partisipasi kelompok rentan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, sehingga semakin memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan. Selain itu, diskriminasi yang terus berlanjut dapat memicu ketegangan sosial, memperdalam perpecahan dalam masyarakat, serta menghambat upaya pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa kerentanan sosial bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi tantangan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang inklusif untuk mengatasi dampak kerentanan dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

6. Strategi Mengurangi Kerentanan Komunitas

Kerentanan komunitas terhadap berbagai risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat diminimalkan melalui berbagai strategi yang berfokus pada pemberdayaan, aksesibilitas, kebijakan publik, peran organisasi sosial, dan partisipasi masyarakat (Astuti, 2021a; Indarto et al., 2020;

Saputra et al., 2022). Berikut adalah beberapa strategi utama dalam mengurangi kerentanan komunitas:

a. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Pemberdayaan sosial dan ekonomi merupakan langkah utama dalam meningkatkan ketahanan komunitas. Strategi ini mencakup:

- Pelatihan Keterampilan: Meningkatkan keterampilan anggota komunitas agar dapat mandiri secara ekonomi.
- Pemberian Modal dan Akses Keuangan: Menyediakan akses terhadap kredit mikro dan bantuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan: Meningkatkan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
- Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas: Mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi agar menjadi pilar ekonomi komunitas.

b. Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam mengurangi kerentanan komunitas. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- Penyediaan Pendidikan yang Inklusif dan Terjangkau: Membangun sekolah di daerah terpencil, menyediakan beasiswa, serta mengintegrasikan pendidikan berbasis keterampilan.
- Pelayanan Kesehatan yang Merata: Mempermudah akses terhadap layanan kesehatan dasar, vaksinasi, serta program kesehatan ibu dan anak.

- Kampanye Kesadaran Kesehatan dan Gizi: Memberikan edukasi tentang pola hidup sehat dan pentingnya gizi seimbang.
- Penyediaan Infrastruktur Dasar: Meningkatkan fasilitas sanitasi, air bersih, dan transportasi untuk mendukung kesehatan dan pendidikan.

c. Kebijakan Publik yang Berpihak pada Komunitas Rentan

Kebijakan publik yang inklusif sangat penting untuk melindungi komunitas rentan. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah:

- Regulasi yang Mendukung Perlindungan Sosial: Mengembangkan program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan bantuan sosial.
- Kebijakan Perumahan dan Permukiman: Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin.
- Peningkatan Akses terhadap Lapangan Kerja: Mendorong penciptaan lapangan kerja yang ramah bagi kelompok rentan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang adil.
- Perlindungan Lingkungan dan Mitigasi Bencana: Membuat regulasi untuk mengurangi risiko bencana dan memastikan perlindungan terhadap ekosistem yang menopang kehidupan komunitas.

d. Peran Lembaga Sosial dan Organisasi Non-Pemerintah

Lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah (NGO) berperan penting dalam memperkuat komunitas melalui berbagai program dan advokasi. Peran mereka meliputi:

- **Fasilitator Program Pemberdayaan:** Menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan bagi komunitas.
- **Advokasi Hak-Hak Komunitas:** Membantu komunitas dalam mengakses hak-hak dasar mereka melalui advokasi kebijakan.
- **Penyedia Bantuan Darurat:** Memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi.
- **Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta:** Menjalin kemitraan untuk mengimplementasikan program yang berkelanjutan dan efektif.

e. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat meliputi:

- **Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Publik:** Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan.
- **Mendorong Demokrasi Partisipatif:** Melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- **Penguatan Organisasi Masyarakat Lokal:** Membantu pembentukan kelompok-kelompok berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian.
- **Implementasi Program Berbasis Masyarakat:** Mendorong proyek pembangunan yang diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, komunitas dapat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrem, serta menghormati perbedaan (M. Nur et al., 2020). Dalam konteks masyarakat yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik antarindividu maupun kelompok.

Prinsip utama dalam moderasi beragama meliputi sikap toleransi, keterbukaan, serta penghargaan terhadap keragaman keyakinan dan budaya (Lintong & Kilis, 2023). Sikap moderat dalam beragama tidak berarti mengabaikan nilai-nilai spiritual, melainkan menekankan keseimbangan antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap hak orang lain untuk meyakini ajaran agamanya masing-masing.

Pentingnya moderasi beragama terlihat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan sikap moderat, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis, mencegah munculnya radikalisme atau fanatisme yang berlebihan, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai (Putri & Budiman, 2022). Selain itu, moderasi beragama juga memperkuat persatuan dalam keberagaman dengan menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan.

Dalam praktiknya, moderasi beragama dapat diterapkan melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebersamaan, dialog lintas agama yang konstruktif, serta kebijakan sosial yang mendukung kehidupan yang toleran dan damai. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya menjadi konsep, tetapi juga bagian dari upaya nyata dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban.

1. Pengertian Moderasi Beragama

a. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sikap dan cara berpikir yang menekankan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, menghindari segala bentuk ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme yang cenderung kaku dan tertutup maupun liberalisme yang berlebihan dan lepas dari nilai-nilai dasar agama (Syahrin et al., 2023). Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya secara adil dan proporsional, tanpa merugikan hak-hak individu lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep ini menekankan pentingnya sikap toleran, saling menghormati, serta mampu beradaptasi dengan keberagaman sosial dan budaya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, moderasi beragama menjadi fondasi dalam menjaga harmoni dan persatuan di tengah pluralitas masyarakat (Khoirul Mudawinun Nisa et al., 2021). Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam beribadah, tetapi juga sebagai prinsip dalam membangun interaksi sosial yang damai dan inklusif.

Di Indonesia, moderasi beragama menjadi salah satu kebijakan strategis dalam menjaga keutuhan bangsa yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam. Prinsip-prinsip utama dalam moderasi beragama meliputi toleransi, anti-kekerasan, penerimaan terhadap perbedaan, serta komitmen kebangsaan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, moderasi beragama dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik berbasis agama dan memperkuat kehidupan sosial yang harmonis.

b. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan suatu sikap yang menekankan keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama (Syahrin et al., 2023). Sikap ini tidak hanya menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk konservatisme yang berlebihan maupun liberalisme yang kebablasan, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Landasan moderasi beragama dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

1) Landasan Filosofis

Moderasi beragama didasarkan pada nilai-nilai universal yang dianut oleh berbagai agama, seperti:

- Keadilan, yang mengajarkan untuk bersikap adil dalam menilai, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama manusia.
- Keseimbangan, yang menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama dan menyesuaikannya dengan kehidupan sosial.
- Toleransi, yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik beragama tanpa mencederai hak asasi manusia.

2) Landasan Ideologis

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama berlandaskan pada ideologi negara, yaitu:

- Pancasila, sebagai dasar negara yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi fondasi bagi kehidupan beragama yang harmonis dan toleran di tengah keberagaman Indonesia.
- Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan negara yang menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks moderasi beragama, Bhinneka Tunggal Ika mendorong umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai tanpa diskriminasi dan konflik sektarian.

3) Landasan Yuridis

Moderasi beragama juga memiliki pijakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2, yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Moderasi Beragama, yang menekankan pentingnya sikap moderat dalam beragama guna menjaga harmoni sosial.

4) Landasan Sosiologis dan Kultural

Sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menjaga harmoni sosial melalui kearifan lokal yang berorientasi pada toleransi dan gotong royong. Berbagai tradisi dan praktik sosial telah menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dalam perbedaan.

Moderasi beragama bukan hanya sekadar konsep, tetapi merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keberagaman dan harmoni sosial (Astuti et al., 2022). Dengan landasan filosofis, ideologis, yuridis, serta sosiologis dan kultural yang kuat, moderasi beragama menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan.

2. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

a. Toleransi

Toleransi merupakan sikap menerima perbedaan, baik dalam keyakinan, praktik ibadah, maupun pandangan keagamaan. Toleransi bukan hanya sebatas sikap pasif dalam membiarkan perbedaan terjadi, tetapi juga tindakan aktif dalam menciptakan harmoni antarumat beragama. Sikap toleran mencerminkan penghormatan terhadap hak individu dalam menjalankan keyakinannya masing-masing, tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Dalam konteks moderasi beragama, toleransi menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis.

b. Anti-Kekerasan

Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk konflik yang muncul akibat perbedaan agama harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan damai. Kekerasan dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan persaudaraan. Oleh karena itu, moderasi beragama menanamkan pemahaman bahwa solusi terbaik dalam menyikapi perbedaan adalah melalui pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan.

c. Keseimbangan (Tawazun)

Prinsip keseimbangan dalam beragama mengajarkan agar seseorang tidak berlebihan (ifrath) dalam menjalankan ajaran agama hingga melupakan aspek sosial, tetapi juga tidak terlalu longgar (tafrith) hingga kehilangan esensi beragama. Tawazun atau keseimbangan dalam beragama berarti menjaga keselarasan antara ibadah dan kehidupan sosial, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara tradisi dan modernitas. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, umat beragama dapat menghindari ekstremisme dan menjalani kehidupan beragama yang lebih moderat, relevan, dan kontekstual.

d. Nasionalisme

Moderasi beragama juga menekankan pentingnya nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan penghormatan terhadap konstitusi negara. Prinsip ini menegaskan bahwa pengamalan nilai-nilai agama harus sejalan dengan semangat kebangsaan dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Nasionalisme dalam moderasi beragama bukan berarti menomorduakan agama, tetapi

memahami bahwa beragama juga harus membawa manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, moderasi beragama mendorong umat beragama untuk aktif dalam membangun negara yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan.

3. Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sehari-hari

a. Dalam Pendidikan

Moderasi beragama dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, serta penghormatan terhadap keberagaman ke dalam kurikulum. Sekolah dan lembaga pendidikan berperan penting dalam menanamkan sikap saling menghormati di antara peserta didik. Guru dan tenaga pendidik dapat memberikan contoh nyata melalui pengajaran yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kebangsaan yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti diskusi lintas agama dan studi perbandingan agama juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis.

b. Dalam Media Sosial

Di era digital, media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam menyebarkan informasi, termasuk mengenai moderasi beragama. Pengguna media sosial dapat menerapkan sikap moderat dengan menghindari penyebaran ujaran kebencian, berita hoaks, dan konten provokatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan (Nisa' & Rofiki, 2022). Sebaliknya, media sosial dapat digunakan sebagai platform untuk menyebarkan pesan damai, memperkuat rasa kebersamaan, serta membangun kesadaran akan pentingnya

menghormati perbedaan. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan toleran.

c. Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Moderasi beragama juga harus tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari. Sikap moderat dalam beragama dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam dialog antaragama, partisipasi dalam kegiatan sosial lintas iman, serta mendukung kebijakan yang memperkuat harmoni sosial. Masyarakat yang moderat akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan sesama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Selain itu, sikap saling menghargai dalam kehidupan bertetangga dan komunitas akan menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif, di mana setiap individu merasa diterima dan dihormati.

Dengan menerapkan moderasi beragama dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

4. Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

a. Tantangan

Meningkatnya Radikalisme dan Ekstremisme Radikalisme dan ekstremisme berbasis agama menjadi tantangan utama dalam mewujudkan moderasi beragama. Kelompok-kelompok yang memiliki pandangan eksklusif terhadap agama tertentu cenderung menolak perbedaan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Fenomena ini dapat mengancam keharmonisan masyarakat dan merusak nilai-nilai keberagaman.

Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian Berbasis Agama Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempermudah penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama. Informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu perpecahan di masyarakat dan memperkuat sikap intoleran terhadap kelompok lain. Media sosial sering menjadi sarana penyebaran konten yang dapat memperkeruh hubungan antar umat beragama.

Kurangnya Pemahaman terhadap Esensi Moderasi Beragama Pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep moderasi beragama menjadi faktor penghambat dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif. Sebagian individu atau kelompok masih menganggap moderasi beragama sebagai upaya melemahkan keyakinan agama, padahal sejatinya moderasi beragama bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam beragama agar tetap menghargai perbedaan dan menciptakan harmoni sosial.

b. Solusi

Pendidikan Moderasi Beragama Sejak Dini Upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan formal dan informal. Kurikulum sekolah perlu memasukkan materi tentang toleransi, keberagaman, dan pentingnya sikap moderat dalam beragama. Selain itu, keluarga dan komunitas juga berperan dalam menanamkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama.

Penguatan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Moderasi Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung moderasi beragama, termasuk dalam menangani penyebaran ujaran kebencian dan intoleransi berbasis agama. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait intoleransi harus dilakukan

secara adil dan transparan agar dapat menciptakan efek jera serta mencegah konflik yang lebih luas.

Kerjasama Lintas Agama dalam Membangun HarmoniDialog dan kerjasama lintas agama menjadi langkah strategis dalam membangun keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Melalui forum-forum diskusi, kegiatan sosial, dan kerja sama dalam bidang kemanusiaan, masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat memperkuat persaudaraan dan mengurangi potensi konflik. Selain itu, tokoh agama dan pemimpin komunitas memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan damai dan saling menghormati antar umat beragama.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menerapkan solusi yang tepat, moderasi beragama dapat diwujudkan secara lebih efektif demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

C. Konsep Mitigasi Bencana

1. Definisi dan Konsep Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak dari bencana, baik melalui tindakan struktural maupun non-struktural (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 2015; UNISDR, 2009). Mitigasi berfokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Mitigasi bencana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi (Ferani Mulianingsih, Arif Purnomo, Anang Widhi Nirwansyah, Zuhrian Ivan

Arvianto, 2024; Prihanto & Wiguna, 2019). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana mencakup berbagai aspek yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

a. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural adalah langkah-langkah fisik atau teknis yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, seperti:

- Pembangunan tanggul dan bendungan untuk mengurangi risiko banjir.
- Penerapan standar bangunan tahan gempa.
- Pembangunan kanal atau sistem drainase untuk mengendalikan aliran air.
- Penghijauan dan reforestasi untuk mencegah longsor dan erosi.

b. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural melibatkan kebijakan, peraturan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti:

- Pendidikan dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana.
- Pembuatan peta rawan bencana dan sistem peringatan dini.
- Perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana.
- Penguatan kelembagaan dan regulasi mitigasi bencana.